PELAKSANAAN RELOKASI PASAR TRADISIONAL KOTO PANJANG KOTA SOLOK

SKRIPSI

Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai Salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)

VIGGO PRATAMA PUTRA

NIM : 2017/17042132

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2021

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul	**: Pelaksanaan Relokasi Pasar Tradisional Koto Panjang Kota Solok**
Nama	**: Viggo Pratama Putra**
NIM / TM	**: 17042132/2017**
Program Studi	**: Ilmu Administrasi Negara**
Jurusan	**: Ilmu Administrasi Negara**
Fakultas	**: Ilmu Sosial**

Padang, 23 Agustus 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing

Dr. Zikri Alhadi S.IP., MA.
NIP.198406062008121003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri padang

Pada hari Jum'at, 20 Agustus 2021 Pukul 14.00 WIB s/d 15.30 WIB

Pelaksanaan Relokasi Pasar Tradisional Koto Panjang Kota Solok

Nama	: Viggo Pratama Putra
TM/NIM	: 2017/17042132
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial

Padang, 23 Agustus 2021

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Zikri Alhadi, S.IP., MA.	1.
Anggota	: Afriva Khaidir, SH., M.Hum., MAPA., Ph.D	2.
Anggota	: Adil Mubarak, S.IP., M.Si	3.

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP

Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Viggo Pratama Putra
NIM/TM	: 17042132/2017
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Relokasi Pasar Tradisional Koto Panjang Kota Solok"** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 24 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,

Viggo Pratama Putra

17042132/2017

ABSTRAK

VIGGO PRATAMA PUTRA 17042132 **Pelaksanaan Relokasi Pasar Tradisional Koto Panjang Kota Solok**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis temuan penelitian berupa pelaksanaan relokasi Pasar Tradisional Koto Panjang Kota Solok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kota Solok, Pedagang Pasar Tradisional Koto Panjang, dan Pakar Kebijakan Publik. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa proses advokasi dari pelaksanaan relokasi Pasar Tradisional Koto Panjang belum berjalan efektif karena tidak sepenuhnya mengakomodir kebutuhan prioritas dari pedagang, hal tersebut disebabkan karena lemahnya proses advokasi kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok. Banyak indikator yang melatarbelakangi pelaksanaan relokasi pasar Tradisional Koto Panjang, diantaranya karena keinginan untuk mengembalikan fungsi utama jalan transportasi dan populasi yang padat di Pasar Tradisional Koto Panjang. Namun akibat dari tidak berjalannya advokasi kebijakan yang baik dan benar telah menyebabkan dampak yang serius pada sektor ekonomi dan sosial kepada para pedagang di Pasar Tradisional Koto Panjang.

Kata kunci: Pelaksanaan, Relokasi, Pasar Tradisional

KATA PENGANTAR

Segala puji kita ucapkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul "***Pelaksanaan Relokasi Pasar Tradisional Koto Panjang Kota Solok***" Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang

2. Ibuk Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

3. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

4. Bapak Afriva Khaidir, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Penguji Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran terkait kegiatan akademik perkuliahan

5. Bapak Dr. Zikri Alhadi, S. IP., M.A selaku Pembimbing Skripsi yang telah membantu, mengarahkan dan membimbing penulis selama perkuliahan dan pembuatan skripsi ini

6. Bapak Adil Mubarak S.IP M.Si selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan serta kritik yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini

7. Bapak dan Ibuk Dosen serta Staf pengajar pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu pengatahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan

8. Seluruh staff Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kota Solok yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan dalam penelitian

9. Teristimewa untuk kedua orangtua penulis Bapak Suardi S.H dan Ibuk Susi Nelli S.H yang sangat penulis cintai, serta saudara/saudari kandung penulis Sonya Pricilia dan Benito Dwi Putra yang sudah memberikan doa, harapan, dukungan dan motivasi berharga kepada penulis untuk melancarkan pembuatan skripsi ini

10. Teruntuk rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2017 yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan dalam persaudaraan yang telah kita bangun bersama.

11. Dan terakhir untuk diri sendiri yang sudah sejauh ini berjuang dan bertahan. Terimakasih telah menjadi kuat dan hebat, semoga lebih kokoh lagi menghadapi perjuangan selanjutnya di masa yang akan mendatang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak. Aamiin.

Padang, 2021

Viggo Pratama Putra
17042132

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR …….. ii

DAFTAR ISI ……iv

DAFTAR TABEL ……...vii

DAFTAR GAMBAR ……..….viii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah..... 13

C. Pembatasan Masalah.....14

D. Rumusan Masalah.....14

E. Tujuan Penelitian 15

F. Manfaat Penelitian 15

BAB II KAJIAN PUSTAKA 17

A. Kajian Teoritis 17

1. Konsep Analisis dan Kebijakan……17

a. Analisis……...17

b. Kebijakan.....18

c. Kerangka Analisis Kebijakan 22

2. Konsep Advokasi Kebijakan 28

3. Konsep Pelaksanaan dan Pembangunan.....31

a. Pengertian Pelaksanaan.....31

b. Fungsi Pelaksanaan.....33

c. Jenis Pelaksanaan.....34

d. Pengertian Pembangunan 34

e. Model-Model Pembangunan.....35
4. Konsep Pasar Tradisional.....36
a. Pengertian Pasar Tradisional.....36
b. Ketentuan Lokasi Pasar Tradisional.....38
c. Fungsi Pasar Tradisional.....38
d. Kultur Sosial Pasar Tradisional 39
B. Kajian Penelitian Yang Relevan.....40
C. Kerangka Konseptual.....43
BAB III METODE PENELITIAN.....45
A. Jenis Penelitian.....45
B. Kehadiran Peneliti.....46
C. Lokasi Penelitian.....47
D. Informan Penelitian.....47
E. Jenis dan Sumber Data.....48
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....49
G. Analisis Data.....51
H. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....53
A. Temuan Umum.....53
1. Gambaran Umum Kota Solok 53
2. Gambaran Umum Pasar Tradisional Kota Solok 56
B. Temuan Khusus.....57
1. Proses Advokasi dari Pelaksanaan Relokasi Pasar Tradisional Koto Panjang Kota Solok 59
2. Faktor-Faktor yang Menentukan Proses Relokasi Pasar Tradisional Koto

Panjang Kota Solok ……...67
3. Dampak Pelaksanaan Relokasi Pasar Tradisional yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok ……....70
C. Pembahasan 72
BAB V PENUTUP.....87
A. Kesimpulan 87
B. Saran.....89
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pedagang Pasar Raya Solok Menurut Lokasi Tahun 2019……..5

Tabel 1.2 Pedagang Kaki Lima Jalan Lingkar Koto Panjang Tahun 2019 (Kanan)…….8

Tabel 1.3 Pedagang Kaki Lima Jalan Lingkar Koto Panajng Tahun 2019 (Kiri)…8

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Yang Relevan……39

Tabel 3.1 Informan Penelitian……48

Tabel 4.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Solok……..54

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Solok Berdasarkan Kelompok Umur 2018….55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sketsa Denah Lokasi Pasar Raya Kota Solok Tahun 2019……7

Gambar 2.1 Tahapan Kebijakan Publik……..26

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi suatu wilayah tergantung dari kegiatan ekonomi, dimana kegiatan tersebut ditentukan dengan permintaan barang dan jasa maka dari itu kegiatan ekonomi suatu wilayah erat kaitannya dalam mempertemukan permintaan dan penawaran, pada suatu lokasi kegiatan yaitu pasar. Pasar adalah tempat dimana penjual dan pembeli bertemu dengan terjadinya proses tawar menawar. Transaksi yang dilakukan merupakan kesepakatan didalam melakukan kegiatan jual beli yang memiliki syarat dengan adanya barang yang di perjual belikan, dimana terdapat pedagang dan pembeli yang melakukan kesepakatan diantara harga dan jumlah barang, dan juga tidak terdapat paksaan dari pihak manapun.

Pasar merupakan tempat terjadinya proses transaksi barang dan jasa serta kegiatan ekonomi untuk melihat hubungan masyarakat dengan aktivitas ekonomi, selain itu tempat terjadinya kontak sosial, budaya, fisik maupun tingkah laku individu-individu yang ada di pasar. Sosiologi memandang pasar sebagai fenomena sosial yang kompleks dengan berbagai macam perangkatnya. Pasar dapat dipandang dari sudut yang beragam dan merupakan suatu struktur yang padat dengan jaringan sosial atau yang penuh dengan konflik atau persaingan. Dari berbagai pengertian tentang pasar dan pendapat ahli dapat dibuat kesimpulan bahwa pasar merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli yang diarahkan oleh permintaan dan penawaran dalam proses, ruang dan waktu. Pengertian pasar seperti ini memberikan keleluasaan analisis sosiologis yang tidak menyangkut

proses, tetapi juga terkait dengan ruang dan waktu (Damsar, 2018:9).

Pasar secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu pasar tradisional dan pasar modern, pasar tradisional sendiri merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi secara langsung dan adanya proses tawar menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kelebihan dari pasar tradisional terjadinya transaksi tawar menawar antara pedagang dan pembeli secara langsung.

Pasar tradisonal juga mempunyai kekurangan antara lain biasanya tempat becek dan kotor, pengemasan barangnya kurang baik, beberapa makanan dan barang-barangnya berkualitas kurang baik, barang-barang yang tersedia kurang lengkap. Ciri-ciri pasar tradisional ini adalah areal pasar tradisional biasanya di tempat yang terbuka, barang yang dijual umumnya keperluan memasak dapur dan rumah tangga, harga barang yang diperjual belikan relatif murah dan terjangkau proses jual beli barang memulai proses tawar menawar.

Beberapa pasar tradisional yang terkenal di Indonesia adalah pasar Beringharjo Yogyakarta, yang memiliki nilai historis dan filosofis dengan Kraton Yogyakarta karena telah melewati tiga fase yakni masa kerajaan, penjajahan, dan kemerdekaan. Ciri khas bangunan pasar Beringharjo dapat dilihat pada interior bangunan yang merupakan perpaduan antara arsitektur kolonial dan tradisional Jawa. Pasar Beringharjo khusus menjual berbagai jenis batik mulai batik kain maupun sudah jadi pakaian, bahan katun hingga jadi sutra. Koleksi batik kain dijumpai di los pasar bagian barat sebelah utara.

Sementara itu, Pasar tradisional di wilayah Sumatra Barat bukanlah sesuatu yang baru, salah satu Pasar Tradisional yang terkenal adalah Pasar Atas dan Pasar Lereng Bukittinggi. Pasar Atas Bukittinggi ini sudah ada sejak sebelum era kolonial, sebelum penjajah Belanda menaklukkan Bukittinggi. Di Pasar Atas ini pembeli dapat menemukan aneka kain sulaman khas Sumatra Barat. Menariknya di pasar ini adalah sulaman pada kain, merupakan sulaman tangan para pengrajin. Harganya bervariasi mulai dari 250.000-700.000, tergantung sulaman dan jenis bahan. Pasar Lereng Bukittinggi lebih dominan menjual barang bekas, yang berasal dari Medan. Pasar ini menjadi tempat belanja favorit bagi yang ingin berburu sandang dengan harga miring. Ada lebih 100 kios di Pasar Lereng yang menjual barang bekas impor.

Di Sumatera Barat setiap daerah ada pasar tradisional yang berbeda- beda dan memiliki keunikan. Salah satunya di Kota Solok terdapat pasar tradisional yang dibangun 1971 yang dinamakan dengan Pasar Raya Solok. Pasar dibangun atas partisipasi swasta khususnya petak ruko-ruko sejak tahun 1974. Kawasan Pasar Raya Solok juga menjadi tempat mencari penghidupan bagi 29 persen masyarakat Solok sehingga pembangunan pasar Raya mempunyai *multiplier* efek bagi perkembangan perekonomian Kota Solok (Harian Haluan, 2019).

Kawasan dari Pasar Raya Solok telah menjadi tempat mata pencaharian dan penghidupan bagi 29% masyarakat Solok sehingga pembangunan dan pengembangan Pasar Raya akan mempunyai efek multidimensional bagi perkembangan perekonomian dari Kota Solok. Pasar Raya Kota Solok telah menjadi destinasi dari tujuan belanja dari daerah tetangga seperti Kabupaten

Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya. Sehingga Pasar Kota Solok sangat potensial dalam meningkatkan taraf dari roda perekonomian masyarakat dan juga dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan Daerah Kota Solok. Ini menjadi PR bagi Pemerintah Daerah untuk terus berinovasi meramaikan pasar serta terus meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Untuk itu pada tahun 2017 pemerintah Kota Solok membangun pasar baru yaitu Pasar Syariah Terminal Bareh Solok persis di pintu gerbang Terminal Bareh Solok. Pasar Rakyat itu dibangun dengan dana Rp 6 milyar bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) APBN 2017. Calon pedagang yang berhak menempati Pasar Rakyat adalah pedagang aktif yang berjualan di sepanjang jalan lingkar Koto Panjang. Jalan lingkar ini direncanakan akan dibebaskan dari aktifitas jual beli pedagang yang biasanya berjejer di samping kiri dan kanan Jalan Lingkar Koto Panjang.

Pasar Raya Solok sendiri secara historis telah ada sejak zaman Belanda, sampai sekarang dan malah semakin berkembang, yang terlihat dari jumlah pedagang yang semakin banyak, perkembangan pasar seiring dengan perkembangan penduduk perkotaan termasuk banyaknya pedagang sehingga membutuhkan pasar yang baru. Pemerintah Kota Solok ingin memindahkan pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir Jalan Koto Panjang dengan tujuan agar tidak terjadi lagi hambatan lalu lintas kendaraan. Jalan Koto Panjang yang seharusnya digunakan untuk kendaraan lalu lintas, saat ini disalahgunakan bagi pedagang kaki lima untuk berjualan kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut juga

memicu sering terjadinya kemacetan kendaraan lalu lintas. Tak hanya itu, jalanan yang becek dan sering kumuh seakan telah menjadi "pakaian" yang melekat bagi Pasar Raya Solok sehingga dirasa sangat diperlukan pembenahan lebih lanjut. Untuk menampung pedagang kaki lima tersebut, maka pemerintah Kota Solok telah membangun pasar berjarak lebih kurang 4 (empat) kilometer dari pasar lama. Dari hasil observasi walau Pasar Syariah sudah dibangun, namun pedagang keberatan atau enggan untuk pindah.

Sampai saat ini (April 2020) bangunan pasar yang berlokasi di Terminal Bareh Solok belum ditempati pedagang, sehingga bangunan menjadi terbengkalai dan tidak maksimal untuk dioperasionalkan. Diduga permasalahan di Pasar Kota Solok ini berbeda dengan permasalahan pasar di tempat lain, yaitu kendala yang sistemik jika ditarik secara historis dan fenomena sosial masyarakatnya dalam hal ini pedagang dan pemerintah. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa keberatannya sejumlah pedagang untuk dipindahkan walaupun kondisi fisik Pasar Rakyat relatif lebih baik dari kondisi di Jalan Lingkar Koto Panjang.

Namun sebelum menjelaskan lebih jauh tentang perbandingan kondisi Pasar Raya Solok dengan Pasar Tadisional atau Pasar Rakyat Solok, maka berikut ditampilkan tabel mengenai jumlah pedagang pasar Raya Kota Solok berdasarkan lokasi tahun 2019.

Tabel 1.1 Jumlah Pedagang Pasar Raya Solok Menurut Lokasi Tahun 2019

No.	Lokasi	Jumlah Petak Kios
1.	Kios Mini Depan Pos Satpam	26
2.	Les Gambar (Terminal Angkot)	14

3.	Los Ayam Batang Lembang	19
4.	Depan Los Sayur	6
5.	Blok U	6
6.	Bawah Tangga	28
7.	Terminal Angkot	16
8.	Samping Los Sayur	8
9.	Kios Dang Tuanku(Terminal Angkot)	31
10.	Pasar Samping Tahap VI	7
11.	Bawah Tower	4
12.	Los Sayur	50
13.	Kios Tahap VI Lantai 1	64
14.	Kios Tahap VI Lantai 2	48
15.	Bangunan Service	22
16.	Kios Samping Los E	21
17.	Los E	41
18.	Koto Panjang	65
19.	Lenggogeni(Komplek Terminal Angkot)	32
20.	Bagonjong(Komplek Terminal Angkot)	15
21.	Tahap 3 Blok VII Lantai 1	52
22.	Tahap 3 Blok VII Lantai 2	38
23.	Bawah Tangga Blok VII	7
24.	Blok E Lantai 1	32
25.	Blok E Lantai 2	3
26.	Kios Mini Pelataran Blok VI	14
27.	Blok A Lantai 1	76
28.	Blok B Lantai 1	76
29.	Blok C Lantai 1	76
30.	Blok D Lantai 1	75
31.	Antara Blok A dan B	3
32.	Antara Blok C dan D	3
33.	Tahap 1 Lantai 2 Blok A	74
34.	Tahap 1 Lantai 2 Blok B	76
35.	Tahap 1 Lantai 2 Blok C	58
36.	Tahap 1 Lantai 2 Blok D	64
37.	Antara Blok C&D/Antara Blok A&B	6
38.	Blok VI Lantai 1	44
39.	Blok VI Lantai 2	57
40.	Blok VIII	40
41.	Los Pisang	7
	Total	**1.404**

***Sumber** : Dinas Koperindag, Bidang Pengelolaan Pasar Kota Solok 2019*

Untuk memperkuat penjelasan mengenai jarak dan kondisi maka berikut

penulis juga menampilkan denah lokasi.

Gambar 1.1 Sketsa Denah Lokasi Pasar Raya Kota Solok Tahun 2019

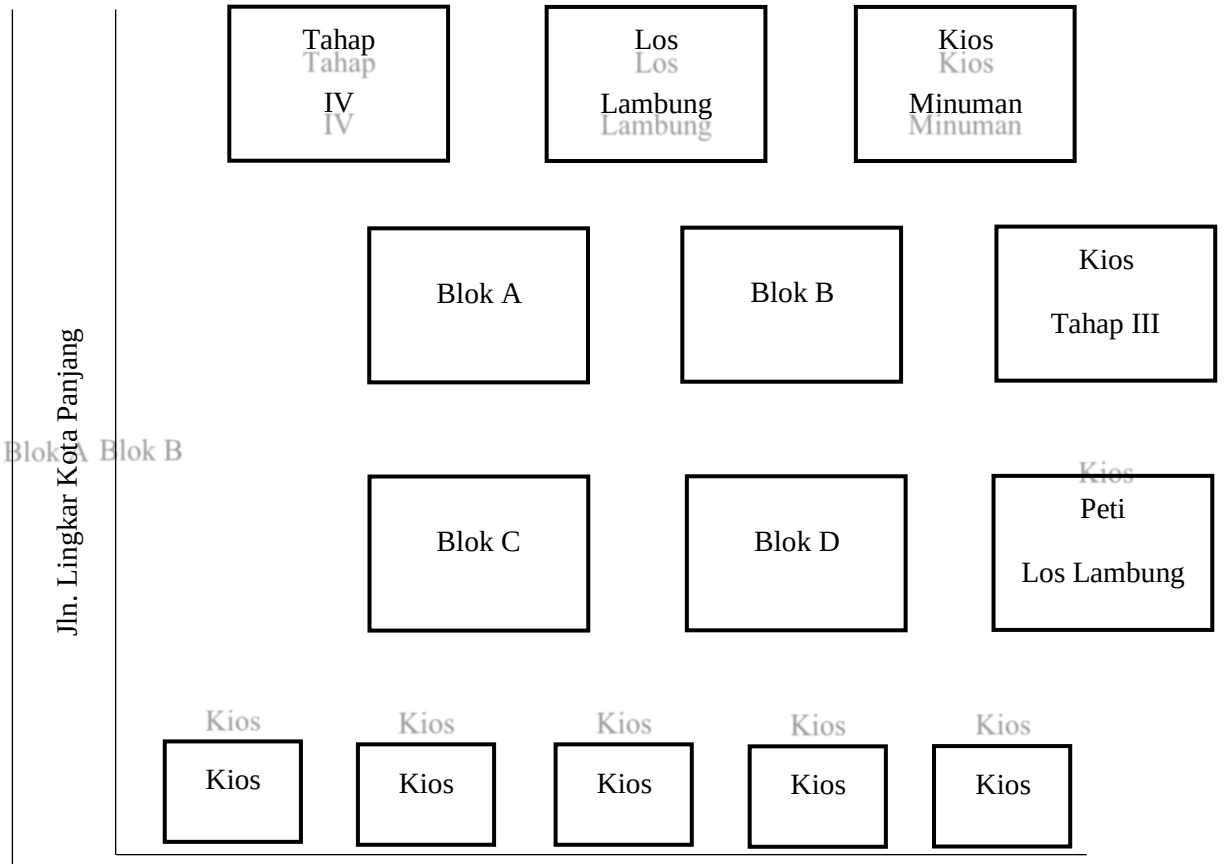

Jln. Lingkar Kota Panjang Sebelah Kiri

***Sumber** : Dinas Koperindag Bidang Pengelolaan Pasar Kota Solok 2019*

Berdasarkan dari data tabel di atas, pedagang Raya Solok yang rencananya akan dipindahkan ke Pasar Rakyat hanya pedagang kaki lima yang berdagang di sepanjang Jalan Koto Panjang dengan jumlah 140 pedagang.

Berikut rincian pedagang kaki lima yang berdagang di sepanjang Jalan Lingkar Koto Panjang.

Tabel 1.2 Pedagang Kaki Lima Jalan Lingkar Koto Panjang Tahun 2019

Sebelah Kanan

No.	Jenis Dagangan	Jumlah Pedagang		Jenis Kelamin			
				Laki-Laki		Perempuan	
		DD	DO	DD	DO	DD	DO
1.	Sayuran	55	47	5	2	50	45
2.	Buah	2	2	1	1	1	1
3.	Cabe	7	6	2	2	5	4
4.	Bawang	5	5	2	2	3	3
5.	P&D(Bahan Harian)	1	1	-	-	1	1
6.	Makanan	1	1	1	1	-	-
7.	Ikan Kering	1	1	-	-	1	1
8.	Telur	1	1	1	1	-	-
9.	Perlengkapan (Pecah Belah)	2	2	1	1	1	1
Total		75	66	13	10	62	56

***Sumber** : Dinas Koperindag Bidang Pengelolaan Pasar Kota Solok 2019*

Ket: DD = Data Dinas DO = Data Observasi

Tabel 1.3 Pedagang Kaki Lima Jalan Lingkar Koto Panjang Tahun 2019

No.	Jenis Dagangan	Jumlah Pedagang		Jenis Kelamin			
				Laki-Laki		Perempuan	
		DD	DO	DD	DO	DD	DO
1.	Sayuran	39	31	5	3	34	28
2.	Buah	1	1	-	-	1	1
3.	Cabe	8	7	2	2	6	5
4.	Bawang	3	3	-	-	3	3
5.	Kelontong	1	1	-	-	1	1
6.	Ayam Potong	5	4	2	1	3	3
7.	Ikan Kering	5	3	2	1	3	2
8.	Daging	1	1	-	-	1	1
9.	Telur	1	1	1	1	-	-
10.	Makanan	1	-	-	-	1	-
Total		65	52	12	8	54	44

***Sumber** : Dinas Koperindag Bidang Pengelolaan Pasar Kota Solok 2019*

Ket : DD = Data Dinas DO = Data Observasi

Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya dapat dirunut lagi bahwa pedagang di Jalan Lingkar Koto Panjang tersebut keberatan atau dipindahkan ke Pasar Rakyat di Terminal Bareh Solok. Fokus penelitian ini adalah ingin fokus pada bagaimana pelaksanaan relokasi Pasar Tradisional tersebut serta dampak yang dihasilkan baik oleh pemerintah ataupun masyarakat (pedagang).

Berdasarkan observasi awal, penulis berasumsi bahwa kendala utama belum dipindahkannya pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang Jalan Lingkar Koto Panjang adalah terletak pada koneksi serta koordinasi yang tidak terbangun baik antara pemerintah dalam memahami aspek dampak disisi psikologis dan antropologis serta struktur sosial pedagang sekitar Jalan Lingkar Koto Panjang yang selalu mengaitkan aspek historis dibalut kecemasan akibat dampak yang akan datang jika pasar direlokasi. Diduga pertimbangan pemerintah adalah takut berisiko terhadap munculnya konflik yang dapat memicu ketidakstabilan daerah, kemungkinan lain menyangkut kepentingan proses pemilihan kepala daerah sehingga mempertimbangkan aspirasi konstituen pemilih yang cenderung sangat berpotensi di pasar, kemungkinan indikasi pembangunan pasar Rakyat Solok dibangun tanpa menanyakan aspirasi pedagang yang akan dipindahkan.

Kemungkinan lain adalah pembangunan Pasar Tradisional atau Pasar Rakyat tanpa studi kelayakan yang tepat, ada kemungkinan juga disebabkan potensi korupsi proses pembangunannya oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, dimungkinkan juga karena kurangnya diseminasi oleh Pemerintah Kota mengenai

pemindahan pasar yang berada di jalan lingkar Koto Panjang menyebabkan pedagang belum mengetahuinya. Oleh sebab itu, semua dugaan dan kemungkinan tersebut perlu ditelusuri lebih dalam walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa ada pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap semua kejadian ini seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, TNI, dan Polisi.

Beberapa waktu lalu dilansir dari portal berita Pos Metro Padang, Zul Elfian dan Reinier selaku Walikota dan Wakil Walikota sendiri mengatakan, "Dengan berbagai pertimbangan untuk kepentingan bersama, mengembalikan fungsi jalan lingkar pasar perlu dilakukan. Solusi yang tepat sebagai langkah untuk merelokasi para pedagang yang berjualan disepanjang jalan lingkar perlu dilakukan". Terlebih Pasar Tradisional yang telah disediakan Pemerintah Daerah di Terminal Bareh Solok sudah rampung dan sudah diresmikan pemakaiannya sejak tahun 2019. Bahkan untuk mendukung keberadaan Pasar yang baru tersebut, Walikota Solok mengeluarkan imbauan kepada ASN untuk berbelanja di Pasar Tradisional yang baru guna merangsang masyarakat dan pedagang untuk memanfaatkan Pasar tersebut pasca pemberlakuan himbauan untuk merelokasi Pasar Tradisional Koto Panjang ke Pasar di Terminal Bareh Solok.

Lebih lanjut, Zul Elfian berencana untuk memakai metode voucher/kupon belanja untuk seluruh ASN di Pasar Tradisional yang baru. Menariknya, voucher/kupon belanja ASN ini akan diundi sekali tiga bulan. Walikota Solok juga meminta keseriusan dan bentuk dukungan nyata OPD untuk dapat memberikan penjelasan dengan baik terhadap rencana optimalisasi penggunaan Pasar Tradisional yang baru disamping ikut menyampaikan kepada stakeholder

terkait, sehingga tidak terjadi informasi yang simpang siur di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan info yang penulis dapatkan, pada masa bencana non alam yang terjadi pada tahun 2020 yakni Covid-19 yang ikut memberikan dampak signifikan bagi masyarakat di seluruh Indonesia termasuk di Kota Solok yang juga sangat juga dirasakan oleh pedagang pasar raya di Kota Solok. Adanya virus corona ini, menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan pemindahan pasar yang berada di jalan lingkar Koto Panjang ke Pasar Rakyat yang baru beberapa bulan yang lalu.

Pemindahan pasar ini di mulai pada tanggal 1 mei 2020, diawali oleh adanya seorang pengunjung pasar yang tidak sadarkan diri di tengah pasar tepatnya di pasar jalan lingkar Kota Solok ini. Hal ini juga menyebabkan penutupan pasar raya Solok selama beberapa hari dari tanggal 2 Mei sampai tanggal 3 Mei 2020. Namun pasar yang menjual barang pokok yang biasanya berjualan di jalan lingkar Koto Panjang langsung dipindahkan ke Pasar Rakyat di sebelah Terminal Bareh Solok Kelurahan Simpang Rumbio.

Setelah dipindahkan, pemerintah dalam hal ini Walikota Solok dengan cepat dan tegas mengeluarkan *statement* untuk memindahkan pedagang yang berjualan di jalan lingkar Koto Panjang secara permanen atau selamanya. Penggusuran lapak pedagang yang sempat ricuh pada akhir masa putusan relokasi yang awalnya 2 hari ini kemudian mendapat kritikan dan protes yang keras dari pedagang sehingga muncul konflik antara pedagang dan pemerintah. Setelah pemindahan pasar, pasar yang lama tersebut langsung dibongkar dan dijaga ketat

oleh pihak yang berwenang, ini dibuktikan melalui Surat Tugas dari Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM Kota Solok) pada Dinas Satpol PP No. 511.2/56/DPKUKM tentang permohonan bantuan personil pengamanan/penertiban Jalan Lingkar Koto Panjang Pasar Raya Kota Solok. Namun masih banyak pedagang yang tidak patuh dengan kembali berdagang di tempat semula. Beberapa pedagang juga ada yang jualan di Pasar Rakyat, dan sebaliknya ada juga yang masih membangkang kepada pemerintah dengan berjualan di jalan lingkar Koto Panjang secara sembunyi-sembunyi, beberapa masyarakat beralasan bahwa pemerintah tidak serta merta memindahkan secara keseluruhan dari pedagang yang biasa berjualan di Jalan Lingkar Koto Panjang dan juga tidak menetapkan regulasi yang jelas dan tegas jika terjadi pelanggaran.

Dilansir dari laman berita klikpositif.com, disebutkan bahwa pada awalnya wacana Pemerintah Kota Solok merelokasi pegadang disepanjang saluran pembuangan air dibagian belakang Pasar Raya Solok atau tepat di Pasar Tradisional Kota Panjang itu mendapat penolakan dari para pegadang, hingga pedagang mengadukan hal tersebut ke DPRD Kota Solok. Wacana tersebut semakin mencuat semenjak adanya sosialisasi program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) pada Kamis tanggal 17 Januari 2019 di ruangan rapat Pasar Raya Solok. Disebut oleh Pemko Solok bahwa lokasi yang digunakan pedagang saat ini akan direnovasi ulang kemudian dijadikan arena bermain dengan konsep taman hijau serta sebagai areal parkir. Ditaksir, setidaknya ada 143 pedagang yang terdampak akibat kebijakan tersebut. Dengan memanfaatkan momentum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) beberapa waktu lalu yang mewajibkan adanya jaga jarak

secara fisik, Pemko Solok beserta stakeholder pengamanan lainnya memindahkan atau merelokasi pedagang ke Pasar di Terminal Bareh Solok.

Menariknya disini, Bidang Sarana dan Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kota Solok berpendapat bahwa pedagang tidak ingin direlokasi karena selalu mengaitkan dengan jejak historis Pasar Tradisional Koto Panjang yang pada awal sekali dihuni oleh pedagang-pedagang dari beberapa nagari di Kabupaten Solok. Selalu saja ada pertentangan yang terjadi jika Pemerintah Kota Solok menyatakan keinginan untuk merelokasi pedagang di Pasar Tradisional Koto Panjang tersebut, baik itu dari pedagang maupun dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok.

Berdasarkan permasalahan yang problematik di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang fokus dari tujuan kebijakan dan instrumen-instrumen kebijakan yang dipakai serta efektivitasnya pada Pasar Rakyat Kota Solok dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul **"Pelaksanaan Relokasi Pasar Tradisional Koto Panjang Kota Solok"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah ada di atas, maka masalah penelitian dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Adanya kendala yang problematik dalam pelaksanaan relokasi Pasar Tradisional di Kota Solok

2. Terjadinya benturan pada penerapan relokasi pedagang yang sudah puluhan tahun berjualan di Pasar Tradisional Kota Solok tersebut

3. Adanya tindakan sepihak dari Pemerintah Kota Solok terkait relokasi pedagang permanen pada masa Pandemi Covid-19 di awal Mei 2020 lalu

4. Tidak adanya koordinasi yang efektif antara Pemerintah Kota Solok dengan pedagang terkait pelaksanaan relokasi

5. Dampak pelaksanaan relokasi Pasar Tradisional Kota Solok yang terbilang kompleks untuk pemerintah serta pedagang

6. Lemahnya pelaksanaan sosialisasi dan advokasi kebijakan yang dilakukan pemerintah

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan maka penulis perlu membatasinya yakni sebagai berikut :

1. Proses advokasi pelaksanaan relokasi Pasar Tradisional di Kota Solok.
2. Dampak dari relokasi Pasar Tradisional di Kota Solok.

D. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah diatas, maka penulis dapat membuat rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimana proses advokasi dari pelaksanaan relokasi Pasar Tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok?
2. Faktor-faktor yang menentukan proses relokasi Pasar Tradisional Kota Solok?
3. Apa dampak dari pelaksanaan relokasi Pasar Tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses advokasi dari pelaksanaan relokasi Pasar Tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan atau mempengaruhi proses relokasi Pasar Tradisional Kota Solok.
3. Untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan relokasi Pasar Tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka dapat ditarik manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan kontribusi akademis dalam merumuskan regulasi dan mengadvokasi proses pelaksanaan yang berhubungan dengan relokasi pasar tradisional. Termasuk efektif atau tidaknya program relokasi untuk peningkatan daya saing pasar tradisional.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan data untuk mengetahui program dari pelaksanaan hingga dampak relokasi pasar yang dicanangkan oleh pemerintah serta dapat mengetahui informasi tentang keadaan pasar tradisional setelah direlokasi.
3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pelaksanaan relokasi pasar dan dampak dari kebijakan tersebut.

4. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan relokasi pasar yang dicanangkan oleh pemerintah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Analisis dan Kebijakan

a. Analisis

Analisis menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianty (2002:52) dapat didefenisikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan per bagian itu sendiri serta menyangkut hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan. Analisis juga dapat diartikan sebagai bentuk kemampuan dalam menguraikan atau memecahkan suatu materi atau mencari informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga akan lebih mudah untuk dipahami. Pada dasarnya, analisis dan penelitian mempunyai sebuah makna yang sama. Dimana pengertian dalam bahasa inggris "*research*" juga disebut sebagai "riset" yang mempunyai arti mencari. Dengan demikian, analisis dan penelitian mempunyai dasar makna "mencari kembali" (Imam Machali 2017:15).

Ahmad Zumaro (2011:110) mengemukakan bahwa analisis merupakan hal yang sangat diperlukan bagi manusia, khususnya anak muda untuk membentuk karakter yang dibutuhkan oleh bangsa Indonsia. Malasnya pemuda untuk melakukan tindakan analisis akan berpengaruh bagi pemikiran mereka, yang mana pada saat ini arus teknologi sangatlah pesat. Begitu juga dengan perkembangan

internet, dunia pendidikan di era sekarang memang mendekatkan pada internet, tujuan awalnya adalah untuk mendapatkan informasi bahan ajar yang disodorkan buku ajar. Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Suharso dan Ana Retnoningsih (2005), disebutkan bahwa analisis adalah metode penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan lainnya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya mengenai sebab akibat, duduk perkara dan sebagainya.

Analisis secara sederhana juga dapat disebut sebagai bentuk proses penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (KBBI Departemen Pendidikan Nasional: 2005). Wiradi (2006) menyebutkan bahwa analisis merupakan aktifitas dari sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk di golongkan maupun di kelompokan kembali sesuai kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan di tafsirkan maknanya.

Berdasarkan pengertian teoritis diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa analisis merupakan proses dari kegiatan berfikir dalam fungsinya mengurai dan membagi-bagi informasi kemudian mencari kaitan dari informasi/data tersebut untuk memperoleh pemahaman dan kesimpulan dari sebuah konteks perdebatan.

b. Kebijakan

Kebijakan dalam terjemahan bahasa Inggris disebut sebagai "*policy*", yang memiliki pengertian sebuah proses mengurus masalah atau kepentingan umum, termasuk administrasi pemerintah. Kebijakan atau *policy* secara umum biasanya dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor seperti seorang

pejabat, kelompok, instansi atau lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Kebijakan merupakan salah satu jenis tindakan Administrasi Negara yang berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang.

Imron (1996) menyebutkan bahwa kebijakan ialah terjemahan dari kata "*wisdom*" yang merupakan suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan pada seseorang ataupun kelompok. Weihrich dan Koontz dikutip dari Amin Priatna mengatakan bahwa kebijakan adalah alat untuk membersihkan hati atau harapan yang mendorong dan merupakan inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan mencoba merefleksikan posisi dan kekuasaan dalam sebuah organisasi.

Membuat kebijakan sama juga dengan merencanakan, karena kebijakan merupakan persyaratan atau pemahaman atau pengertian yang akan mengarahkan pikiran dalam membuat sebuah keputusan. Tidak semua kebijakan adalah pernyataan, tetapi sering diimpilkasikan dari tindakan manajer. Koontz, Donnell dan Weihrich menyebutkan bahwa kebijakan adalah tuntutan dalam berfikir untuk langkah membuat keputusan (*decision making*), dimana keputusan diambil dalam batas-batas tertentu. Keputusan akan memerlukan tindakan yang dimaksudkan untuk memutuskan sebuah komitmen (Koontz, Donnell dan Weihrich 1992:144).

Menurut Noeng Muhadjir (2000:15), kebijakan merupakan upaya dalam memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi 4 (empat)

hal penting yakni :

1. Tingkat hidup masyarakat meningkat

2. Terjadi keadilan (*by the law*, *social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual)

3. Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi)

4. Terjaminnya pengembangan berkelanjutan

Amri Marzali (2012:20) menyebutkan bahwa kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang akan terkena dampat dari keputusan tersebut. Sebuah kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk tujuan membuat perilaku orang banyak yang menjadi kelompok target menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan dari kebijakan tersebut. Thomas R. Dye juga mendefenisikan kebijakan (dalam konteks Negara) sebagai *is whatever government choose to do or not to do* (Winarno 2009:17). Sejalan dengan itu ia mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan dan kebijakan yang meliputi semua tindakan pemerintah.

Dapat dikatakan bahwa kebijakan ialah pedoman dalam menuntun dan membuat keputusan atas sebuah komitmen, dan dapat meliputi ruang lingkup sempit maupun luas. Karenanya, Frederick, Davis dan Post berpendapat bahwa kebijakan pada tingkat publik ditujukan kepada tindakan yang diambil oleh

pemerintah untuk mempromosikan perhatian umum (masyarakat banyak) terhadap kebijakan publik mulai dari pajak, pertahanan nasional hingga perlindungan pada lingkungan. Kebijakan publik ini nantinya dapat membuat perbedaan antara keuntungan dan kegagalan.

Clarle O. Jone (1991: 166) menyebutkan bahwa dewasa ini, istilah kebijakan lebih sering dipergunakan secara luas dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah, serta perilaku Negara pada umumnya. Peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan sebuah produk dari perbuatan tata usaha Negara yang bertujuan untuk menampakkan keluar suatu kebijakan yang sifatnya tertulis dan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional sikap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, sehingga tidak dapat lagi mengubah atau menyimpang dari aturan perundang-undangan (Hadjon Philip 1994:152).

Menyinggung tentang kebijakan publik, Arifin Tahir (2011:38) menyebutkan bahwa ada 5 (lima) hal yang berhubungan erat dengan kebijakan publik. Pertama, kegiatan yang berorientasi pada tujuan haruslah menjadi perhatian utama dari perilaku acak. Kedua, kebijakan merupakan pola model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah. Ketiga, kebijakan harus mencakup tindakan nyata atau apa yang dikatakan dan dikerjakan harus sejalan. Keempat, bentuk kebijakan publik secara positif didasari pada ketentuan hukum dan kewenangan. Kelima, tujuan dari kebijakan publik adalah dapat tercapainya kesejahteraan pada masyarakat melalui keluaran produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Dari pengertian para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah kerangka dari serangkaian konsep dan azas yang pada hakikatnya mencakup pertanyaan (*what*, *why*, *who*, *where*, dan *how*) mengenai pelaksanaan sebuah pekerjaan, sikap kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam bertindak, cita-cita, serta prinsip dengan maksud untuk memecahkan masalah sebagai pedoman dalam pencapaian sebuah sasaran dan tujuan yang diinginkan.

c. Kerangka Analisis Kebijakan

1) Pengertian Analisis Kebijakan

William N. Dunn (2008) mendefefinisikan analisis kebijakan sebagai salah satu bagian dari disiplin Ilmu Sosial Terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan serta mentransformasikan informasi yang seimbang dan relevan dengan kebijakan yang akan digunakan pada lingkungan politik secara spesifik untuk memecahkan masalah dalam kebijakan. Dunn juga memahami bahwa analisis kebijakan merupakan bentuk penelitian sosial terapan yang disusun secara sistematis sebagai kerangka dalam mengetahui substansi dari kebijakan agar nantinya informasi yang diterima mengenai masalah-masalah dapat dijawab melalui penerapan kebijakan.

Analisis kebijakan juga dapat ditafsirkan berupa kegiatan atau aktivitas dalam menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam meneliti sebab, akibat dan kinerja kebijakan serta program publik, diperlukan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan melalui analisis kebijakan. Dunn (2000:1) menjelaskan bagaimana efektivitas dari pembuatan

kebijakan akan bergantung pada akses terhadap stok pengetahuan yang ada, maka proses komunikasi dan penggunaan analisis kebijakan akan menjadi sangat penting pada praktik serta teori pembuatan kebijakan publik.

2) Ruang Lingkup Kebijakan Publik

Lingkup kebijakan publik bersifat sangat luas, karena dapat meliputi berbagai sektor dan bidang dalam skala pembangunan, seperti kebijakan publik pada bidang pertahanan nasional, bidang pertanian, bidang pendidikan, bidang transportasi, bidang kesehatan dan banyak bidang lainnya. Konsep tersebut dapat disadari sangat luas karena ia mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi sebuah permasalahan publik.

Dalam perspektif David Easton, (Dikutip Dye, 1981), ketika pemerintah membuat sebuah kebijakan publik, maka ketika itu pula pemerintah sedang mengalokasikan nilai-nilai langsung kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai (*value*) di dalamnya. Artinya, sebuah proses penerapan kebijakan publik tidaklah boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan beresiko mendapat penolakan atau resistensi pertentangan ketika diimplementasikan.

3) Kerangka Kerja Analisis Kebijakan Publik

Kerangka kerja kebijakan publik dapat dianalisis oleh beberapa variabel, diantaranya :

a) Tujuan yang akan dicapai. Tujuan ini sejalan dengan kompleksitas pencapaian, apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka akan semakin sulit mencapai kinerja kebijakan, begitupun sebaliknya.

b) Preferensi nilai seperti apa yang layak dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Sebuah kebijakan yang mengandung banyak variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk diterapkan dibanding dengan sebuah kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.

c) Sumber daya yang mendukung proses kebijakan. *Output* atau keluaran dari sebuah kebijakan akan dipengaruhi oleh sumber daya finansial, material hingga sumber-sumber infrastruktur yang mendukung lainnya.

d) Kemampuan aktor yang terlibat di dalam pembuatan kebijakan. Tercapainya sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan akan dipengaruhi oleh kualitas para aktor yang terlibat di dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas aktor dapat ditentukan mulai dari tingkat pendidikan, kompensasi pada bidangnya, pengalaman kerja hingga integritas moral yang diperlihatkan.

e) Lingkungan kebijakan. Kinerja dari sebuah kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks lingkungan sosial, ekonomi, politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.

f) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Strategi yang

digunakan dalam pencapaian tujuan sebuah kebijakan akan memengaruhi kinerja dan kualitas dari keluaran kebijakan nantinya.

4) Proses Analisis Kebijakan Publik

Proses analisis kebijakan publik merupakan serangkaian aktivitas yang bersifat intelektual dan dilakukan sebagai bagian dari proses kegiatan yang bersifat politis. William N. Dunn (1994:17) membagi tahapan proses analisis kebijakan publik menjadi lima bagian, diantara lain :

a) Perumusan Masalah, dimana karakteristiknya akan memberikan informasi atau data mengenai kondisi-kondisi yang akan menimbulkan masalah

b) *Forecasting* (Peramalan), memberikan informasi atau skenario data di masa mendatang, efek dari diterapkannya altenatif kebijakan, termasuk dampaknya apabila tidak membuat kebijakan

c) Rekomendasi Kebijakan, memberikan informasi atau data tentang manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan altenatif kebijakan yang nantinya akan memberikan manfaat bersih paling tinggi

d) Monitoring Kebijakan, memberikan informasi atau data mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan beserta kendala-kendala yang dihadapi

e) Evaluasi Kebijakan, memberikan informasi atau data mengenai hasil kinerja dari suatu kebijakan

Gambar 2.1

Tahapan Kebijakan Publik

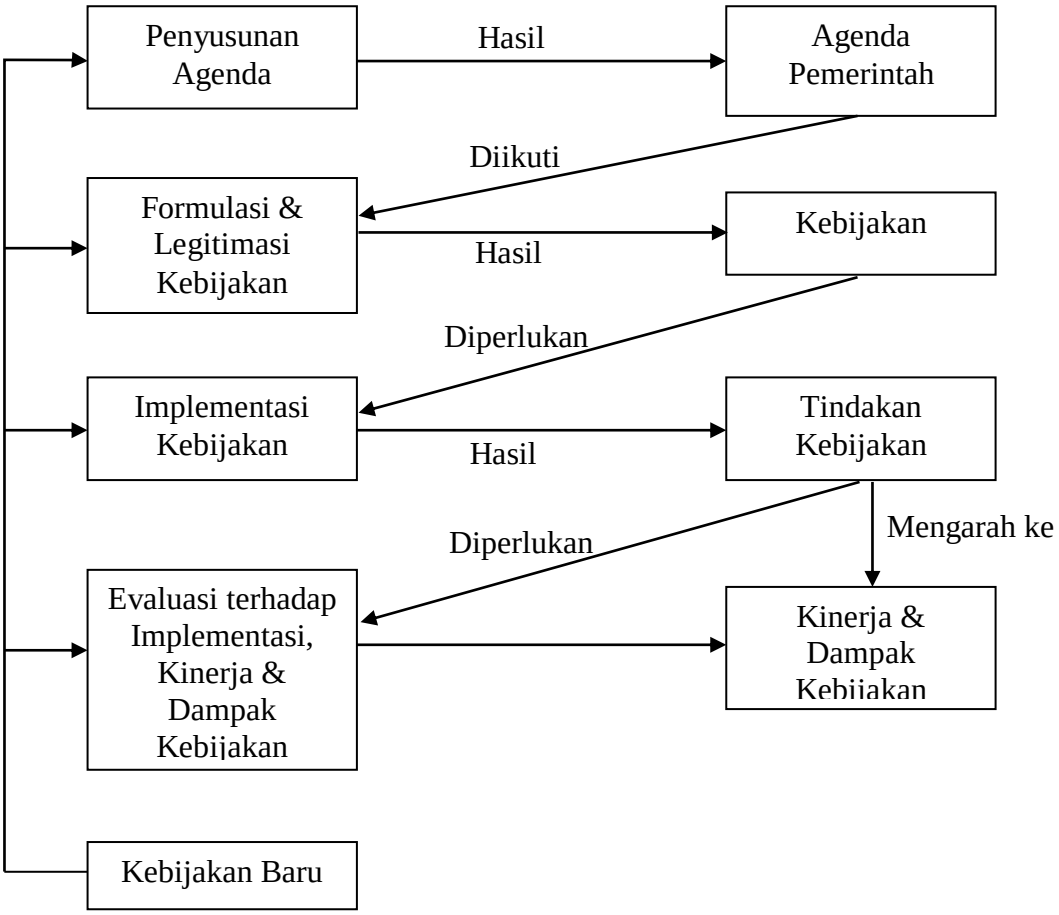

Sumber : Ripley (1985:49)

Dalam menyusun agenda kebijakan, ada 3 (tiga) kegiatan yang perlu untuk dilakukan, yaitu; (1) Membangun persepsi di kalangan *stakeholders* bahwa

sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah; (2) Membuat batasan-batasan dalam masalah; dan (3) Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, atau melalui kekuatan politik serta bisa dilakukan dengan cara mempublikasinya lewat media massa dan sebagainya.

5) Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Pakar ilmu politik secara sederhana (tradisional), mengategorikan kebijakan public ke dalam kategori :

a) Kebijakan Substantif (misalnya : kebijakan buruk, kesejahteraan sosial, hak-hak warga sipil, dan sebagainya)

b) Kebijakan Kelembagaan (misalnya : kebijakan legislatif, yudikatif maupun kebijakan departemen lainnya)

c) Kebijakan Berdasarkan Kurun Waktu (misalnya : kebijakan pada masa reformasi, orde baru, dan orde lama)

6) Implementasi Kebijakan Publik

Clarler O. Jones (1991) mengartikan kebijakan publik sebagai bentuk kebijakan yang penjalanan fungsinya digunakan dalam praktek sehari-hari. Clarles O. Jones memiliki analisis mengenai implementasi kebijakan dengan cara yang skematis, yaitu dengan mendasarkannya pada konsep aktivitas yang sifatnya fungsional. Dengan mengemukakan berbagai dimensi yang ada pada pelaksanaan yang kemudian berlanjut pada penentuan implementasi. Birokrasi diletakkan

sebagai pelaksana primer yang memfokuskan tugas pada kelembagaannya.

Clarles O. Jones membagi implementasi kebijakan menjadi 3 (tiga) aktivitas utama, yakni :

a) Organisasi, sebagai pembentukan kembali sumber daya beserta unit-unit metode yang ada untuk kemudian menjadikannya program berjalan (restrukturisasi sumber daya, pembentukan unit serta metode dalam pelaksanaan program)

b) Interpretasi, sebagai bentuk penafsiran agar program menjadi terencana dan terarah serta dapat diterima dalam pelaksanaannya (merancang program ke dalam tujuan dari rencana)

c) Penerapan, sebagai kebutuhan dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang menjadi rutinitas (dukungan berupa finansial dan lainnya sesuai program kebijakan)

2. Konsep Advokasi Kebijakan

Dokumen *USAID-O ce of Democracy and Governance* (2001) dijelaskan bahwa advokasi merupakan bentuk mekanisme control terhadap kekuasaan. Advokasi dipahami juga sebagai proses *check and balances*. Dimana di dalamnya ada proses individu atau kelompok dan organisasi berusaha mempengaruhi kebijakan publik. Johns Hopskins (1990) menjelaskan bahwa advokasi merupakan bentuk usaha dalam rangka mempengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif.

Advokasi kebijakan diartikan sebagai sebuah proses terencana dan sistematis yang dilakukan dalam rangka memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik sesuai kehendak/kepentingan siapa yang mendesakkan terjadinya perbaikan dan perubahan tersebut, dengan cara mempengaruhi para aktor penentu kebijakan. Ada 6 unsur yang ada di dalam proses advokasi kebijakan, antara lain :

a. Proses yang terencana serta sistematis

b. Mempunyai tujuan memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan

c. Kebijakan publik sebagai sasaran dari advokasi

d. Kehendak aspirasi maupun materi yang didesakkan sebagai pengganti kebijakan lama

e. Pihak yang melakukan proses advokasi

f. Pihak yang diadvokasi (penentu kebijakan)

Yang menjadi sasaran advokasi ialah para pemimpin (policy makers) atau pembuat keputusan (decision makers) baik di institusi pemerintah maupun swasta. Advokasi kebijakan yang baik adalah yang secara sengaja dan tersistematis dirancang untuk mendesakkan adanya dan terjadinya perubahan dalam isi, tata laksana serta budaya hukum yang berlaku pada kebijakan tersebut.

Dalam proses advokasi, peranan komunikasi sangatlah penting, sehingga komunikasi dalam rangka mengadvokasi kebijakan publik memerlukan trik dan kiat khusus agar komunikasi efektif. Kiat-kiatnya antara lain:

a. Jelas (*clear*)

b. Benar (*correct*)

c. Konkret (*concrete*)

d. Lengkap (*complete*)

e. Ringkas (*concise*)

f. Meyakinkan (*convince*)

g. Kontekstual (*contextual*)

h. Berani (*courage*)

i. Hati-hati (*cautious*)

j. Sopan (*courteous*)

Morariu dan Brennan (2009) dalam jurnal *Effective Advocacy Evaluation: The Role of Funders* mendefenisikan advokasi sebagai berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempengaruhi para pengambil keputusan di berbagai tingkatan. Tidak hanya mencakup pekerjaan advokasi seperti litigasi, lobi dan pendidikan publik namun juga termasuk peningkatan kapasitas, jaringan formasi, membangun hubungan, komunikasi, dan pengembangan kepemimpinan.

Lebih lanjut, Morariu dan Brennan juga menyebut bahwa salah satu cara untuk menilai efektivitas kerja advokasi adalah dengan melihat kapasitas internal dan strategi advokasi yang paling diperlukan untuk menjadi sukses dalam upaya

advokasi. Kapasitas diartikan sebagai bentuk keterampilan dan kemampuan implementor, dan strategi ialah luasnya pendekatan yang digunakan untuk pekerjaan advokasi seperti pengorganisasian komunitas dan kampanye media. Tanya Beer menyebut bahwa alasannya terkesan dengan advokasi di organisasi itu dikarenakan pemimpin yang sangat cerdas, cepat langkah, responsif, dan fleksibel.

Dalam proses advokasi kebijakan, yang menjadi kata kunci penting ialah bagaimana pendekatan yang bijaksana sesuai dengan situasi dan kondisi yang dilakukan oleh pemerintah/masyarakat dengan strategi membangun kepercayaan dengan cara menyamakan persepsi, jaringan, kemitraan/kerjasama, serta bentuk pengembangan yang berkelanjutan. Sebagai bentuk langkahnya, decision makers harus bisa mendefenisikan isu strategis, menentukan tujuan advokasi, mengembangkan pesan advokasi, penggalangan sumber daya, serta pengembangan rencana kerja strategis.

3. Konsep Pelaksanaan dan Pembangunan

a. Pengertian Pelaksanaan

Tjokroadmudjoyo (2014: 7) mendefenisikan, “Pelaksanaan sebagai sebuah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan dalam melaksanakan sebuah rancangan, keputusan

atau lain sebagainya.

Menurut Abdullah (2014: 151) berpendapat bahwa “Pelaksanaan ialah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terjadi dari pengambilan keputusan, langkah strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Nurdin Usman (2002: 70) mengatakan “Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, diimplementasikan setelah perencanaan dianggap sudah siap”. Browne dan Waldavsky juga berpendapat bahwa pelaksanaan ialah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Dalam melaksanakan sebuah pelaksanaan atau implementasi, Rondineli dan Cheema (1983: 28) di kutip dari Purwanto dan Sulistyastuti (2012: 90) mengidentifikasi ada 4 faktor atau indikator yang mempengaruhinya, yaitu:

1) Kondisi lingkungan, yaitu berhubungan dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi dimana pelaksanaan dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan mencapai keberhasilannya saat dilaksanakan jika berada dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan pelaksanaan.

2) Hubungan antar organisasi, yaitu bentuk dukungan koordinatif yang baik antara satu organisasi pemerintah dengan organisasi pemerintah lainnya, maupun dengan lembaga/komunitas/masyarakat dalam upaya pelaksanaan sebuah kebijakan.

3) Sumber daya, yaitu keseluruhan sumber daya yang dimiliki oleh implementor dalam menunjang pelaksanaan kebijakan di lapangan maupun di dalam organisasi itu sendiri.

4) Karakter institusi implementor, yaitu bentuk kesanggupan dari implementor dalam melaksanakan sebuah kebijakan yang diberikan kepadanya dan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dari institusi implementor itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan secara defenitif sebagai suatu aktivitas ataupun bentuk usaha yang dilakukan untuk melaksanakan sebuah rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan serta dilengkapi dengan segala kebutuhan meliputi siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan, bagaimana harus dilaksanakan hingga alat-alat yang dibutuhkan pada rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah kebijaksanaan ditetapkan.

b. Fungsi Pelaksanaan

Fungsi pelaksanaan meliputi :

1) Memberikan penugasan serta penjelasan rutin mengenai sebuah pekerjaan

2) Menjelaskan perpanjangan tangan dari ketetapan sebuah kebijaksanaan

3) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan motivasi kerja kepada para masyarakat agar dapat bekerja efektif dan efisien

4) Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak

terkait

c. Jenis Pelaksanaan

Faisal H. Basri (2005: 25) menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) jenis pelaksanaan, yaitu :

1) Pelaksanaan secara langsung, yaitu pelaksanaan dimana pemerintah langsung melakukan sendiri berbagai keputusan, ketentuan hingga aturan yang mendukung pelaksanaan pengembangan.

2) Pelaksanaan secara tidak langsung, yaitu berbagai keputusan atau perundang-undangan, dimana pemerintah tidak melaksanakan sendiri pengembangan tersebut tetapi hanya mengeluarkan ketentuan dan aturan yang dapat mempengaruhi perilaku atau tindakan sebuah organisasi, sehingga berdampak kearah yang sesuai dengan tujuan untuk pencapaian program dari kebijaksanaan yang telah ditentukan.

3) Pelaksanaan campuran, yaitu pelaksanaan dimana untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksud terbuka kesempatan atau peranan yang dapat dilaksanakan baik oleh instansi pemerintah maupun orang kemasyarakatan atau campur keduanya untuk melaksanakan sebuah proyek pengembangan bersama.

d. Pengertian Pembangunan

Portes (1976) mendefenisikan pembangunan sebagai bentuk transformasi di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Arief Budiman (1996: 1) seorang Selo Sumardjan bahkan menceritakan tentang makna pembangunan pada masyarakat

kecil yang unik itu seperti cerita seorang penduduk miskin di sebuah kota kecil di luar Jakarta, “Saya dulu tinggal di Jakarta. Akan tetapi, karena ada pembangunan, saya terpaksa mengungsi kemari”.

Secara umum kata pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemauan hidup berbangsa dan bertanah air. Dalam mazhab Historismus, pembangunan dilihat sebagai sebuah pembangunan ekonomi berdasarkan suatu pola pendekatan yang berpangkal pada perspektif sejarah. Mazhab Historismus menyandarkan fenomena ekonomi dalam produk perkembangan menyeluruh pada tahapan tertentu dalam perjalanan sejarah. Nugroho dan Rochmin Dahuri (2004) mengatakan bahwa pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak dengan sah pada setiap warga negara/masyarakat dalam rangka memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

e. Model-Model Pembangunan

Pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah langkah dalam usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya, dalam hal ini juga termasuk kemajuan secara material. Budiman (1995: 1-2) situasi umum dalam pembangunan sering diartikan sebagai bentuk kehidupan yang kurang diharapkan bagi sebagian orang tersingkir dan sebagai ideologi politik yang memberikan keabsahan bagi pemerintah yang berkuasa untuk membatasi orang-orang yang mengkritiknya.

Budiman (1995: 13-14) juga mendefenisikan pokok-pokok atau unsur dalam

pembangunan: *pertama*, masalah materi yang akan dihasilkan dan dibagi, serta *kedua*, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif yang menjadi manusia pembangun. Paradigma dalam pembangunan seringkali dikategorikan pada 3 (tiga) model pembangunan, yaitu :

1. *Economic Growth*

Model pembangunan ini lebih menekankan orientasi pada pertumbuhan dalam perspektif ekonomi pada jangka waktu tertentu.

2. *Basic Needs*

Model pembangunan ini lebih menyasar pada kebutuhan dasar/kesejahteraan yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan dalam masyarakat secara langsung dengan cara memenuhi kebutuhan dan akses yang cukup bagi dasar masyarakat.

3. *People Centered*

Model pembangunan ini lebih menekankan pada peningkatan perkembangan dan kesejahteraan manusianya secara berkelanjutan. Pada tingkatan proses ini, pemerintah berperan sebagi fasilitator.

4. Konsep Pasar Tradisional

a. Pengertian Pasar Tradisional

Dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 Pasal 1 dijelaskan pengertian pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah

daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerjasama dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui proses tawar menawar.

Geertz (1963) dalam sudut pandang yang berbeda memiliki pendapat bahwa pasar tradisional lebih pada menunjukkan suatu tempat yang diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat *indigenous market trade*, sebagaimana yang telah dipraktikkan semenjak lama (tradisi). Pasar tradisional lebih memiliki ciri khas sebagai *bazar type economic* dengan skala yang kecil. Fakta ini dapat dilihat secara langsung karena pasar tradisional yang melibatkan lebih banyak pedagang yang saling berkompetisi satu sama lain di satu tempat tersebut. Disamping itu, pasar tradisional menjadi lebih menarik pengunjung yang datang dari penjuru wilayah disekitarnya.

Sejalan dengan itu, Brian Berry dalam bukunya *Geography of Market* menyatakan dengan jelas bahwa pasar merupakan tempat dimana terjadi proses tukar menukar. Proses yang terjadi bila ada komunikasi antara penjual dan pemberi erta diakhiri dengan keputusan untuk membeli barang tersebut. Dan pasar akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu secara fisik, mengikuti perubahan tingkah laku penggunanya.

Dapat disimpulkan bahwa pasar tradisional adalah tempat dilaksanakannya kegiatan jual beli dimana ada usaha-usaha kecil, toko, kios, los dan tenda-tenda

yang dikelola oleh pedagang kecil hingga menengah dan berada di bawah otoritas pemerintah secara langsung.

b. Ketentuan Lokasi Pasar Tradisional

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Bab 11 Pasal 11 menjelaskan bahwa penempatan lokasi pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta bentuk-bentuk Usaha Kecil termasuk koperasi yang berada di wilayah bersangkutan.

2. Menyediakan lahan parkir paling sedikit seluruh kebutuhan parkir 1 buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m2 (seratus meter persegi) luas lahan penjualan pasar tradisional.

3. Menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang menjamin pasar tradisional bersih, sehat, aman, tertib dan mampu menciptakan ruang publik yang nyaman.

c. Fungsi Pasar Tradisional

(Akhmad Mujahidin 2014: 142) menjelaskan bahwa pasar memiliki fungsi sebagai indikator penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga serta tempat penyediaan barang dan jasa dalam jangka waktu panjang.

Secara umum, pasar tradisional memiliki 3 (tiga) fungsi utama, diantaranya :

1. Pasar sebagai Sarana Distribusi

Sebagai sarana distribusi, pasar tradisional berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen.

2. Pasar sebagai Pembentuk Harga

Sebagai pembentuk harga, pasar menjadi tempat terjadinya proses tawar menawar antara pembeli dan pedagang yang secara langsung akan membentuk harga setelah terjadinya kesepakatan.

3. Pasar sebagai Sarana Promosi

Sebagai sarana promosi, pasar menjadi tempat yang akan memperkenalkan serta menginformasikan suatu barang/jasa mengenai manfaat, keunggulan dan ciri khasnya pada konsumen (pembeli).

d. Kultur Sosial Pasar Tradisional

DiMaggio dalam Damsar (1995) mengajukan tiga argumen terkait dengan peranan budaya dalam masyarakat pasar, yakni :

1. Budaya membentuk aktor rasional dari ekonomi pasar.

2. Ide-ide, teknologi kognitif dan institusi-institusi yang berkaitan dengan menciptakan kerangka kerja bagi ekonomi pasar.

3. Orang menggunakan budaya untuk menginterpretasikan dan menyesuaikan diri

terhadap hubungan-hubungan serta institusi pasar. Argumen pertama lebih menekankan pada pentingnya nilai-nilai tertentu untuk dapat bergerak leluasa dalam ekonomi pasar. Argumen kedua pada tingkat kolektif masyarakat pasar akan memerlukan seperangkat cadangan, strategi dan institusi yang berbeda dengan bentuk masyarakat lain. Argumen ketiga, berkaitan dengan budaya sebagai sarana dari penanaman bentuk kapitalisme melalui makna.

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Inti Penelitian	Kaitan Penelitian
1.	Nurul Adawiyah Hasibuan	Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Sebelum dan Sesudah Relokasi ke Pasar Induk di Kota Medan	Proses relokasi pasar yang terjadi di Pasar Induk Kota Medan disinyalir memiliki dampak yang signifikan terhadap pedagang, pemerintah bahkan terkesan bertindak seenaknya sendiri tanpa	Proses pelaksanaan relokasi pasar yang terjadi di Pasar Tradisional Kota Solok memiliki relevansi kesamaan secara dampak terhadap para pedagang.

			memperdulikan keberlangsungan hidup warganya sebagai pedagang.	
2.	Ardhyan Dwi Nurcahyo	Analisis Dampak Relokasi Pembangunan Wilayah Pasar Tradisional Songgolangit Kabupaten Ponorogo Tahun 2020	Relokasi pasar Songgolangit berdampak pada bidang ekonomi dengan adanya peningkatan dan penurunan pendapatan pedagang setempat, namun pada bidang sosial tidak terlalu berdampak signifikan.	Salah satu aspek atau *output* dari pelaksanaan relokasi Pasar di Songgolangit dan Pasar Tradisional Kota Solok memiliki kesamaan, yaitu pada dampaknya terhadap keberlangsungan hidup pedagang setempat.
3.	Marsekaldo, Joyce R Rares dan Burhanuddin	Dampak Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional	Kebijakan relokasi pasar telah membuat pendapatan para	Pasar Tradisional Kota Solok yang baru dibangun juga memiliki rentang

	Kiyai	Rawaraja di Wilayah Tobelo Kabupaten Halmahera Utara	pedagang menurun karena aksebilitas ke pasar yang menyulitkan masyarakat dengan jarak yang terlalu jauh dicapai.	jarak yang lumayan jauh dengan Pasar induk Kota Solok.
4.	Sevti Andreasmi dan Budi Utomo	Resistensi Pedagang Terhadap Relokasi Pasar Tradisional di Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin	Terjadi resistensi dikarenakan tidak adanya anggaran dana bantuan dari pemerintah dalam masa transisi dari pasar lama ke pasar baru.	Relevansi dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pembahasan yang sama pada aspek resistensi yang muncul akibat pelaksanaan relokasi pasar yang diterapkan.
5.	Siti Musrifah	Dinamika dan Konflik dalam	Pemerintah diketahui	Relevansi yang sama pada salah

		Proses Relokasi Pedagang Pasar Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara	memiliki tujuan untuk mengatasi kemacetan di depan Pasar Ngabul.	satu aspek tujuan Pemerintah Daerah Kota Solok untuk mengurai kemacetan di Jalan Lingkar Koto Panjang Kota Solok.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir dalam menggambarkan antara konsep yang akan diteliti, tujuannya adalah untuk memudahkan penelitian. Kerangka ini sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan, menentukan persepsi dan keterkaitan antar bagian yang akan diteliti berdasarkan batasan dan perumusan masalah. Keterkaitan maupun hubungan variabel yang akan diteliti diuraikan dengan berpijak pada kajian teoritis diatas. Dalam penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana pelaksanaan relokasi Pasar Tradisional Kota Solok yang kemudian tentu menghasilkan berbagai dampak.

Secara sederhana, kerangka konseptual yang penulis gambarkan adalah sebagai berikut :

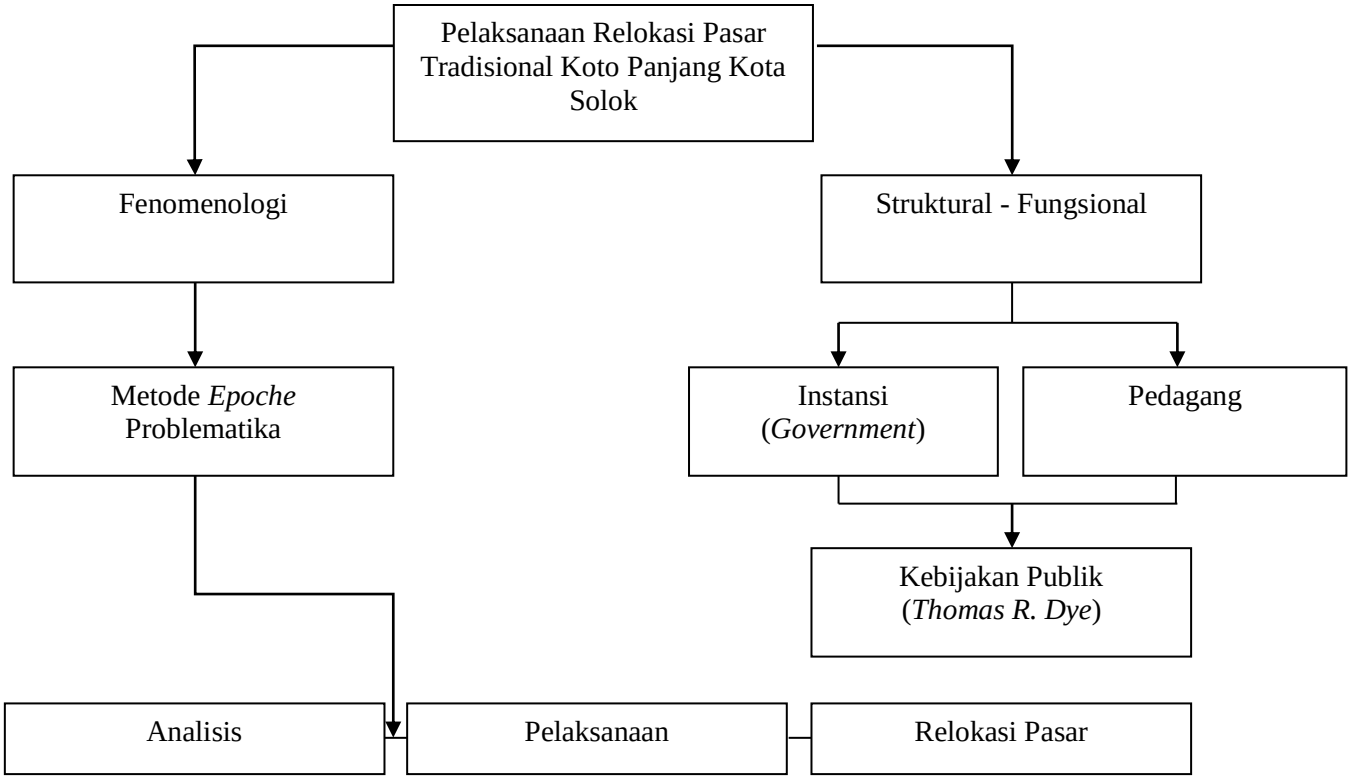

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

1. Proses advokasi dari pelaksanaan relokasi pasar tradisional Koto Panjang Kota Solok tidak berjalan efektif sebagaimana seharusnya kajian advokasi kebijakan yang baik. Pemerintah tidak secara tuntas melaksanakan kajian

mendalam terhadap proses lobi, peningkatan kapasitas implementor, pendidikan publik dan perluasan jaringan informasi dalam membangun komunikasi terhadap para pedagang dalam cakupan advokasi kebijakan yang efektif. Proses pelaksanaannya sendiri juga tidak sepenuhnya mengakomodir kebutuhan prioritas dari pedagang yang ternyata menginginkan direlokasi permanen tetapi secara menyeluruh untuk pedagang yang berjualan di Pasar Tradisional Koto Panjang demi keberlangsungan perekonomian pedagang yang berkelanjutan.

2. Pemerintah Daerah Kota Solok melakukan relokasi pasar tradisional Koto Panjang Kota Solok karena diindikatori oleh pasar tradisional Koto Panjang yang ditakutkan menjadi klaster baru daerah perkembangan Covid-19. Namun selain itu, ditemukan fakta bahwa ternyata banyak hal lain yang melatarbelakangi keinginan pemerintah tersebut disamping karena Covid-19, dimana pemerintah juga berkeinginan untuk mensterilkan kawasan Jalan Lingkar Koto Panjang agar dapat kembali menjadi jalur transportasi yang bisa dilalui tanpa kemacetan. Di samping itu, Pasar Syariah di Terminal Bareh Solok yang terbilang lebih layak pakai memang diperuntukkan untuk para pedagang yang berjualan di Pasar Tradisional Koto Panjang. Namun, faktor-faktor tersebut tidak dikaji dan direncanakan secara matang bersama dengan para pedagang sehingga penerapan kebijakan nihil untuk dilaksanakan sampai kini.

3. Pelaksanaan relokasi pasar tradisional Koto Panjang Kota Solok berdampak pada sektor ekonomi dan sosial yang mana menjadi bagian yang sangat

terpengaruh akibat direlokasinya pedagang dari pasar tradisional Koto Panjang ke Pasar Syariah Terminal Bareh Solok. Perelokasian pedagang yang tidak disertai perencanaan jangka panjang yang strategis dan kajian yang kurang mendalam menjadikan pedagang sempat terbengkalai di Pasar Syariah Terminal Bareh Solok. Terbengkalainya pedagang selama kurun beberapa minggu telah membuat para pedagang merugi. Pemerintah sudah seharusnya melakukan kajian mendalam dan lebih komprehensif mengenai segala aspek yang dibutuhkan untuk merelokasi para pedagang.

Saran

Berdasarkan dari hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diajukan untuk pelaksanaan relokasi Pasar Tradisional Koto Panjang Kota Solok adalah:

1. Untuk meloloskan kebijakan pemerintah dalam merelokasi pedagang Pasar Tradisional Koto Panjang secara permanen ke Pasar Syariah Terminal Bareh Solok sebagaimana keterangan *stakeholder* yang menaungi bidang pasar, pemerintah hendaknya menggunakan pendekatan advokatif yang lebih humanis dan persuasif dengan memperhatikan kondisi lingkungan tempat tujuan pasar, aksebilitas pasar, akses transportasi, retribusi, hubungan harmonis antara pemerintah dan pedagang yang dapat secara rangkap dilakukan ketika sama-sama merumuskan kebijakan, sumber daya atau implementor yang mumpuni serta pemahaman yang mendalam tentang teknis komunikasi dan proses advokasi kebijakan.

2. Untuk meningkatkan pengaruh kebijakan sehingga berjalan dengan baik, pemerintah hendaknya melakukan kajian mendalam dengan prinsip-prinsip kemasyarakatan dengan konsep memberdayakan para pedagang sehingga bisa menetap di Pasar Syariah Terminal Bareh Solok. Perumusan secara bersama antara pemerintah dan para pedagang merupakan proses yang sangat penting dalam mempengaruhi aktualisasi berjalannya kebijakan.

3. Untuk menekan dan memitigasi resiko akibat relokasi, pemerintah harus bisa dengan tegas menggunakan semua kaki tangan atau (*tools*)-nya. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan aturan penjualan yang kongkrit bagi pedagang sektoral yang akan direlokasi ke Pasar Syariah Terminal Bareh Solok. Setelah itu pemerintah dapat mensosialisasikan keuntungan akibat perelokasian sekaligus mengedukasi pedagang agar sedikit demi sedikit dapat merubah *mindset* pedagang yang berpikir akan lebih untuk berjualan di Pasar Tradisional Koto Panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abbas, Ardi. 2003. *Pemetaan Persepsi stakeholder Pada Peremajaan Pasar Nagari Di Lubuk Alung Padang Pariaman Sumatera Barat; Ringkasan Penelitian Dosen Muda*. 2018. Studi Komparatif Relokasi Pedagang di Pasar Tradisional (Studi Terhadap Pedang Di Pasar Lubuk Buayo Dan Pasar Alahan Panjang Kabupaten Solok; Ringkasan Penelitian Dosen Muda.

Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*; *Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

AG. Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Penerbit Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Amri Marzali. 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta : Kencana

Prenada Media Group, hal 20.

Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Chapter 1-2 and 5.

Arifin Tahir. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pustaka Indonsia Press, hal 38.

Boediono. 2002. *Ekonomi Makro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*. Yogyakarta: BPEE. hal 43

Brian JL. Berry. 1967. *Geography of Market Centers and Retail Distribution*. American : BJL. Berry, p 85-86.

Clarles O. Jones, Penerjemah; Ricky Istamto. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta : Rajawali Press.

Darminto, Dwi Prastowo dan Rifka Julianty. 2002. *Analisis Laporan Keuangan : Konsep dan Manfaat*. AMP-YKPN, Yogyakarta. hal 52.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonsia*. Jakarta: Balai Pustaka, hal 1026.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi kedua)*. Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Dunn, William N. 1994. *Public Policy Analysis: An Introduction*. Prentice-Hall

Internasional, Englewood Cliffs, New Jersey, p 117-124.

Dye, Thomas R. 1981. *Undestanding Public Policy*. New Jersey: Prentice-Hall, Chapter 1.

Hanafie, Rita. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: Penerbit ANDI. hal 17.

Haroid Konntz, Cyrill O'Donell, and Heinz Weihrich. 1992. *Management Eighth Edition*. New York : McGraw-Hill Book Company, p 144.

H.M Hasbullah. 2015. *Kebijakan Pendidikan: dalam Perspektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, Hal 37.

Imam Machali. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Program Studi Manajemen Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah, hal 15.

Maleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mankiw, N. Gregory Munandar dan Aris. 2003. *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. hal 82.

Noeng Muhadjir. 2000. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin, hal 15.

Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV

Sinar, hal 70.

Riant Nugroho D. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Gramedia.

Safri Nugraha dkk. 2005. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 93

Ana Retnoningsih dan Suharso. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).* Semarang: Widya Karya.

Syaiful Sagala. 2018. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung : Alfabeta, hal 97.

Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.

Thomas R. Dye. 1995. *Understanding Public Policy*. New Jersey : Prentice Hall.

Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

William C. Frederick, Keith David and Jame E. Pot. 1998. *Business and society, Coeporate Strategy, Public Policy, Ethic, Sixth Edition*. New York: McGraw-Hill Publishing Company, p 11.

Wiradi. 2006. *Analisis Sosial*. Bandung: Yayasan AKATIGA.

Skripsi, Tesis, Disertasi dan Jurnal :

Ahmad Zumaro. 2011. *Akademika Jurnal Sosial Budaya dan Pemikiran Islam*. Lampung: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STAIN

Jurai Siwo Metro. Vol 16 no 1.

Aldinur Armi, et al. Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar. Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang*. Vol. 04, Nomer 10.

Amin Priatna. 2008. Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia. *Disertasi*. Pasca Sarjana UNJ. 2008, hal 15.

Fransisca Nur'aini Krisna. 2017. Alternatif Kebijakan Permasalahan Ketidakmerataan Penyebaran Guru. *Jurnal Analisis Kebijakan*. Vol. 1 No. 2.

Hasibuan, Nurul Adawiyah. 2013. *"Analisis dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Sebelum Dan Sesudah Relokasi Ke Pasar Induk Di Kota Medan"* Medan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Jannah, Ila Raudhatul. 2013. *"Strategi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima Pasca Pelarangan Berjualan Di Kawasan Simpang Tujuh Unnes"*. Semarang : Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial.

Khatimah, Khusnul. 2012. *"Dampak Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang Di Pasar Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa*

Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Makasar : Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Mario, Rivo Febri. 2009. *"Pengelolaan Dan Revitalisasi Pasar Sumani Kabupaten Solok"*

Morariu, Johanna, and Kathleen Brennan. 2009. "*Effective Advocacy Evaluation: The Role of Funders*" . The Foundation Review 1, No. 3: 8.

Musrifah, Siti. 2015. *"Dinamika Dan Konflik Dalam Proses Relokasi Pedagang Pasar Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara".* Semarang : Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial.

M. Aringga Prasetya dan Luluk Fauziah. 2016. Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*. Vol. 4 No 2.

Nikmah, Rohmatun. 2010. *"Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Asembagus Terhadap Pendapatan Pedagang Dan kepuasan Pembeli Di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbundo".*

Rahman, Musthofa. 2011. Nilai-Nilai Humanisme Islam dan Implikasinya dalam Konsep Tujuan Pendidikan. Jurnal Didaktika Islamika. Vol XI, No 2, hal 240-255.

Yudha, M. Rendi Aulia. 2013. *"Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Sebelum Dan Sesudah Relokasi".* Bandar Lampung : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Internet :

Diakses Tanggal 15 September 2020 Pukul 21.30 WIB.

https://pendidikan.co.id/pengertian-observasi-tujuan-manfaat-jenis-dan-menurutparaahli/#:~:text=Adapun%20macam%20jenis%20observasi%20adalah%20sebagai%20berikut%3A%201,ditentukan%20terlebih%20dahulu%

20kerangkanya.%20...%203%20Observasi%20Eksperimental, Diakses Tanggal 15 September 2020 Pukul 21.45 WIB

Acuan dari Dokumen Remi Pemerintahan Tanpa Pengarang dan Lembaga

Perda Kota Solok Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Surat Tugas Satpol PP dan Damkar (511.2/56/DPKUKM/V/2020) Pada arsip surat 11 Mei 2020 tentang Permohonan Bantuan Personil Pengamanan/Penertiban Jalan Lingkar Koto Panjang Pasar Raya Solok

Perda Kota Solok Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal (pasal 3).

Perda Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Solok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 1).

Perda Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 201 Nomor 3).

PerPres Nomor. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern [JDIH BPK RI]